

ABSTRAK

Anisa Oktaviani Ranteala, 1218010022, 2025: “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak”

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Lebak terus meningkat setiap tahun, meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai belum optimal, terutama dalam hal pendampingan dan rehabilitasi korban. Hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi atas pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang kekerasan seksual pada anak dan perempuan dengan berdasarkan enam aspek: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam perlindungan terhadap anak dan perempuan dari kekerasan seksual di Kabupaten Lebak.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang mencakup enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuannya secara menyeluruh dan dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran kebijakan secara adil, akurat, dan berdaya guna.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, serta studi pustaka. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala UPTD PPA Kabupaten Lebak, pegawai UPTD PPA Kabupaten Lebak, serta keluarga korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya terlaksana. Efektivitas kebijakan belum mampu secara maksimal menekan angka kekerasan seksual karena masih banyak korban yang tidak tertangani secara menyeluruh. Efisiensi adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menghambat pelaksanaan layanan perlindungan dan rehabilitasi. Kecukupan kebijakan juga belum mencakup seluruh kebutuhan korban, terutama pada fase pemulihan dan pendampingan hukum. Pemerataan layanan juga belum optimal karena distribusi bantuan dan pendampingan tidak merata, terutama di wilayah terpencil. Responsivitas pemerintah belum sepenuhnya tanggap terhadap kebutuhan korban, karena masih banyak korban yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang cepat dan tepat. Ketepatan kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi bagi kelompok sasaran secara efektif, terlihat dari rendahnya tingkat rehabilitasi sosial yang diberikan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Evaluasi Kebijakan

ABSTRACT

Anisa Oktaviani Ranteala, 1218010022, 2025: “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan Seksual di Kabupaten Lebak”

Sexual violence against children and women in Lebak Regency continues to increase each year, despite the enforcement of Regional Regulation Number 8 of 2013. However, the implementation of this policy is considered suboptimal, particularly in terms of victim support and rehabilitation. This highlights the need for an evaluation of its implementation.

This research aims to evaluate the policy of Regional Regulation No. 8/2013 on sexual violence against children and women based on six aspects: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy in the protection of children and women from sexual violence in Lebak Regency.

The research employs William N. Dunn's policy evaluation theory, which includes six main criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This theory is used to assess whether the policy has achieved its objectives comprehensively and whether it meets the needs of its target groups fairly, accurately, and effectively.

The method used is a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews, direct observation, documentation, and literature study. Informants in this study included the head of UPTD PPA Lebak Regency, UPTD PPA Lebak Regency employees, and families of victims of sexual violence.

The results showed that policy implementation has not been fully implemented. The effectiveness of the policy has not been able to maximally reduce the number of sexual violence because there are still many victims who are not handled thoroughly. The efficiency of limited budget and human resources hampers the implementation of protection and rehabilitation services. The adequacy of the policy also does not cover all the needs of victims, especially in the recovery phase and legal assistance. Equitable distribution of services is also not optimal because the distribution of assistance and assistance is uneven, especially in remote areas. The government's responsiveness has not been fully responsive to the needs of victims, because there are still many victims who feel that they do not receive quick and appropriate treatment. Policy accuracy has not been fully met for the target group effectively, as seen from the low level of social rehabilitation provided.

Keywords: *Child Protection, Sexual Violence, Policy Evaluation*